



Co-Production in Innovation Development: A Case Study of the Republik Melon in Wates District, Blitar Regency

Nurul Nurhidayati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

Bagus Nuari Harmawan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

Email correspondence : 21041010111@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Purpose : This research was carried out to find out how the form of involvement of melon farmers and social changes felt by melon farmers in the Republik Melon program through the Co-Production approach.

Design/methodology/approach : This research was carried out on the innovation program of the Republik Melon in Wates District, Blitar Regency through a co-production approach. The research method used is qualitative using a case study approach. The data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation.

Findings : The results of this study state that the melon farming community can be involved in the development of the program and the melon farming community is able to get the impact of the program such as improving the economy and social welfare in the form of creating new jobs for melon farmers. In addition to melon farmers, there are several actors involved in cross-sector collaboration such as the Blitar Regency DKPP, the Blitar Regency Bappedalitbang, the Wates District Government, the Wates District BPP, the Wates Farmers Women's Group, and Tugurejo Village MSMEs.

Practical Implication : The results of this research can be used by local governments and program implementers as evaluation materials and decision-making basis in increasing the effectiveness and sustainability of the Republik Melon program in Wates District, Blitar Regency. In addition, through the co-production approach, it is hoped that it can be a reference to strengthen collaboration, empowerment, and community participation in the development of other regional innovation programs.

Originality/value : The innovation program of the Republik Melon in Wates District, Blitar Regency carries the potential of the Wates District area, namely the cultivation

of melons using greenhouse techniques. This program involves melon farmers directly as a driving force, this reflects the concept of co-production, namely the community can play an active role in the innovation process. The involvement of farmers in this program shows several applications of the values of modern public administration, namely collaboration, empowerment, and community participation in regional development governance.

Keywords : Co-Production, Community Participation, Innovation.

Paper type : This type of research is a case study.

Co-Production dalam Pengembangan Inovasi: Studi Kasus Republik Melon di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk keterlibatan petani melon dan perubahan sosial yang dirasakan oleh petani melon dalam program Republik Melon melalui pendekatan *Co-Production*.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini dilakukan pada program inovasi Republik Melon di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dengan melalui pendekatan *co-production*. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Temuan : Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya masyarakat petani melon dapat terlibat dalam pengembangan program serta masyarakat petani melon mampu mendapatkan dampak dari program seperti adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial berupa terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi petani melon. Selain petani melon, terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor seperti DKPP Kabupaten Blitar, Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Pemerintah Kecamatan Wates, BPP Kecamatan Wates, Kelompok Wanita Tani Wates, dan UMKM Desa Tugurejo.

Implikasi Praktis : Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pelaksana program sebagai bahan evaluasi serta dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari program Republik Melon di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Selain itu, melalui pendekatan *co-production* diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperkuat kolaborasi, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan program inovasi daerah lainnya.

Originalitas/Nilai : Program inovasi Republik Melon di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar mengungkap potensi daerah Kecamatan Wates yaitu adanya budidaya melon dengan menggunakan teknik *greenhouse*. Program ini melibatkan petani melon secara langsung sebagai motor penggerak, hal ini mencerminkan konsep dari *co-production* yaitu masyarakat dapat berperan aktif dalam proses inovasi. Keterlibatan petani dalam program ini menunjukkan beberapa penerapan nilai-nilai dari administrasi publik modern yaitu kolaborasi, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pembangunan daerah.

Kata Kunci : *Co-Production*, Inovasi, Partisipasi Masyarakat

Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini yaitu studi kasus (*case study*).

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah,. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwasanya sasaran dari inovasi daerah tersebut diarahkan kepada percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan melalui cara peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut dikarenakan sebuah inovasi menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengembangan dan daya saing pada suatu daerah. Daya saing pada suatu daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah (Hutagalung & Hermawan, 2018).

Tabel 1 Peningkatan Jumlah Partisipasi dan Jumlah Inovasi Daerah Sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2023 di Indonesia

Tahun	Tingkat Partisipasi		Jumlah Inovasi Daerah	
	Jumlah	Presentase Perkembangan	Jumlah	Presentase Perkembangan
2017	-	-	576	-
2018	188	-	3.718	+545%
2019	260	+38%	8.016	+116%
2020	484	+86%	17.779	+122%
2021	519	+7,2%	25.124	+41,3%
2022	510	-1,7%	26.900	+7,06%
2023	527	+3,3%	28.539	+6,09%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2024(diolah peneliti)

Didasarkan pada data **Tabel 1** maka dapat diketahui pada tahun 2023 terdapat 28.539 total jumlah inovasi daerah di Indonesia dengan perkembangan senilai 6,09% dari tahun sebelumnya. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah inovasi daerah.

Tabel 2 Distribusi Inovasi Daerah di Indonesia Tahun 2023

Pulau	Jumlah Pemerintah Daerah	Total Inovasi	Inisiasi	Uji Coba	Penerapan
Jawa	119	11.861	366	383	11.112
Sumatera	164	10.064	469	265	9.330
Kalimantan dan Sulawesi	148	3.934	211	271	3.452
Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku	67	2.454	283	154	2.017
Papua	48	226	33	7	186

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2024 (diolah peneliti)

Total jumlah inovasi daerah pada tahun 2023 yang mencapai 28.539 inovasi yang ada di setiap daerah di Indonesia. Inovasi daerah paling banyak dihadirkan oleh Pulau Jawa dari 119 Pemerintah Daerah dengan jumlah inovasi daerah mencapai 11.861 inovasi daerah. Sementara itu, dengan jumlah inovasi daerah paling sedikit berada di Pulau Papua dengan jumlah 226 inovasi daerah. Pada tahun 2023, beberapa provinsi di Pulau Jawa mampu memperoleh indeks inovasi daerah yang melebihi rata-rata. Salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur yang mampu memperoleh peringkat ke-enam dengan indeks inovasi mencapai 71,38 dengan predikat “Sangat Inovatif”. Provinsi Jawa Timur menghadirkan 189 inovasi unggulan (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2023). Sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, Kabupaten Blitar berhasil memperoleh predikat Kabupaten “Sangat Inovatif” dan meraih ranking ke-32 dari 415 Kabupaten pada tahun 2023. Pada tahun tersebut Kabupaten Blitar berhasil melaporkan 39 inovasi daerah yang telah memenuhi syarat IID, salah satunya yaitu inovasi Republik Melon.

Republik Melon merupakan sebuah inovasi daerah yang dibentuk oleh Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Pemerintah Kecamatan Wates memiliki berbagai komoditas pertanian yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan musiman yang didominasi oleh cabai rawit dan kemudian diikuti oleh tanaman buah melon. Namun, pertahunnya mulai dari 2020 sampai dengan 2023 jumlah luas lahan tanaman melon mengalami penurunan dari yang awalnya 45 hektar kini menjadi 31 hektar. Meskipun demikian, pada tahun 2023 Kecamatan Wates mampu menduduki luas panen melon terbanyak dibandingkan dengan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar dengan total luas panen mencapai 31 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2024).

Program inovasi daerah ini termasuk ke dalam program inovatif yang dikembangkan di Kabupaten Blitar. Republik Melon merupakan sebuah Asosiasi Petani Melon Milineal Wates melalui penerapan sistem manajemen terpadu yang disebut dengan “Republik Melon” untuk menjadi inisiator inovatif dan kreatif yang

berasal dari petani, oleh petani dan untuk petani di Kabupaten Blitar yang secara serius, konsisten, dan berkomitmen menjadikan melon sebagai komoditas unggulan daerah (Republik Melon, 2024). Sejarah dari program ini dikarenakan atas dasar yaitu wilayah Kecamatan Wates berada di wilayah Blitar Selatan yang dikenal sebagai daerah yang kering dan tandus. Kemudian, lahirlah gagasan untuk membudidayakan melon dalam *greenhouse* sebagai alternatif pertanian yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat dikembangkan di tengah keterbatasan sumber daya air.

Pemerintah Kecamatan Wates berupaya untuk dapat mengambil peran aktif dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini meskipun dengan keterbatasan wewenang dan kemampuan finansial (Republik Melon, 2024). Selain itu, adanya ketidakadilan dan keprihatinan yang diterima oleh para petani melon yang ada di Kecamatan Wates seperti dalam penghitungan hasil budidaya melon oleh tengkulak yang awalnya menggunakan timbangan tradisional yang dirasa tidak akurat sehingga hal tersebut tidak menguntungkan para petani melon. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebutlah maka hadirilah program inovasi Republik Melon di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar (Republik Melon, 2024).

Republik Melon menjadi salah satu inovasi daerah yang digagas oleh Pemerintah Kecamatan Wates dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani sekitar dengan cara berbudidaya tanaman melon. Pada tahun 2022, Republik Melon sebagai salah satu inovasi daerah di Kabupaten Blitar mampu memperoleh penghargaan sebagai juara 1 dengan kategori Inovasi atau Inovasi Teknologi Bidang Ekonomi dengan judul “Republik Melon Universe Sistem Manajemen Terpadu Asosiasi Melon Milinial yng Maju, Mandiri, dan Modern secara Berkelanjutan” pada Lomba Kreativitas, Inovasi dan Teknologi (KRENOTEK) Kabupaten Blitar yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Republik Melon, 2024). Petani melon menjadi pelaku utama dalam program Republik Melon di Kecamatan Wates. Namun, dalam perkembangannya terdapat permasalahan dalam keterlibatan partisipasi petani melon dalam program.

Tabel 3 Data Petani Melon di Wilayah BPP Kecamatan Wates

No	Desa	Petani Melon
1	Mojorejo	44
2	Sukorejo	37
3	Ringinrejo	24
4	Wates	24
5	Tugurejo	11
6	Purworejo	5
7	Sumberarum	1
8	Tulungrejo	3
	Total	149

*Sumber : Data BPP Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, 2024
(diolah peneliti dari yang terbesar sampai terkecil)*

Berdasarkan data pada **Tabel 3** tersebut maka dapat diketahui jumlah petani melon di Kecamatan Wates mencapai 149 petani. Namun, dari 149 petani melon yang ada di Kecamatan Wates tersebut hanya terdapat 14 petani saja yang tergabung ke dalam program Republik Melon.

**Tabel 4 Anggota Kelompok Tani Republik Melon
Kecamatan Wates Kabupaten Blitar**

No	Desa	Kecamatan	Jumlah Petani	Status Keanggotaan
1	Sukorejo	Wates	4	Anggota
2	Wates	Wates	4	Anggota
3	Mojorejo	Wates	3	Anggota
4	Tulungrejo	Wates	1	Anggota
5	Kaligambir	Panggungrejo	2	Anggota

Sumber : Data BPP Kecamatan Wates, 2024 (diolah peneliti)

Pada **Tabel 4** diketahui bahwasanya hanya terdapat 14 petani melon yang tergabung ke dalam kelompok tani atau program Republik Melon. Kurangnya keterlibatan petani melon di dalam program Republik Melon maka menjadi suatu tantangan dan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan terutama dalam proses pengembangan program Republik Melon. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya keterlibatan peran dari masyarakat maka dapat menentukan keberhasilan dari sebuah program. Keberhasilan program tersebut merupakan sebuah patokan untuk mengukur sejauh mana program dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan menjadi salah satu indikator dalam mengukur efektivitas program (Naami & Maemunah, 2024).

Co-Production merupakan sebuah proses pemberian layanan antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki tanggungjawab bersama (Asmoro & Imron, 2019). Konsep ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat (Irkham et al., 2019). Menurut Perikangas et al., (2024), *Co-Production* memerlukan sebuah gagasan tentang komunitas, jaringan, ekosistem, platform atau organisasi. Selain itu, *Co-Production* memiliki peluang untuk melibatkan masyarakat yang kurang beruntung dalam proses pengembangan dan penyampaian layanan (Eriksson, 2022). *Co-Production* dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks, keahlian ilmiah saja tidak cukup dan kontribusi pengetahuan dari pemangku kepentingan sangat penting untuk dapat menciptakan pengetahuan yang tidak hanya berkualitas secara ilmiah namun juga kuat secara sosial (Turnhout et al., 2020). Konsep *Co-Production* tersebut memiliki keterkaitan terutama dalam hal dengan keterlibatan warga negara atau pengguna langsung baik di sektor publik maupun swasta (Brandsen & Pestoff, 2006). Konsep ini menekankan bahwa negara bukan hanya sebagai penerima jasa, tetapi juga dapat bertindak sebagai *co-producers* pada berbagai tahapan proses produksi untuk layanan publik (Cepiku et al., 2020). Sehingga,

program inovasi Republik Melon ini merupakan salah satu program yang dapat disesuaikan dengan teori *Co-Production*.

Inovasi sosial menjadi bagian dari proses *Co-Production* yang menawarkan kesempatan untuk mempelajari prinsip dan elemen yang menjadi inti dari produksi inovasi sosial (Perikangas et al., 2024). Inovasi sosial memiliki empat pendekatan yaitu model manajemen organisasi, kewirausahaan sosial, pengembangan produk atau jasa baru, dan model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas (Widhagdha & Anantanyu, 2022). Inovasi sosial dapat mencakup pengembangan solusi yang kreatif dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan sosial, lingkungan, ataupun permasalahan kemanusiaan (Sunarjo, 2024). Inovasi sosial melibatkan pengembangan dan penerapan ide, produk, layanan, dan model baru yang mengarah dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan masyarakat (Moridu et al., 2023). Penelitian mengenai konsep *Co-Production* telah banyak dilakukan, khususnya dalam konteks program inovasi daerah dan inovasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian dari Irkham et al. (2019) yang berjudul "*Application of Co-Production in Waste Management Throught Waste Banks Program in Batu City*" menggambarkan bahwasanya terdapat beberapa hambatan dalam penerapan *Co-Production* dalam program bank sampah di Kota Batu yaitu keterbatasan sumber daya finansial dan fasilitas pendukung, menurunnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, dan diperlukannya sebuah pengelolaan yang lebih inovatif.

Hasil penelitian berikutnya oleh Ramadhan & Juwono (2021) yang berjudul "*Citizen's Participation as Co Producer in Licensing*" menggambarkan bahwasanya partisipasi masyarakat sebagai *co-producer* dalam program perizinan DPMPSTP Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui melalui keterlibatan peran aktif masyarakat, motivasi yang dimiliki masyarakat untuk bergabung dalam program, dan pencapaian nilai publik atau nilai privat dari hasil dan dampak yang ada dalam kegiatan tersebut. Kemudian, hasil dari Zai & Wardiyanto (2024) dengan judul "*Analisis Inovasi Warak Ngendog Dalam Persepktif New Public Governance*" menggambarkan bahwasanya dalam program inovasi Warak Ngendog masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses *Co-Production* seperti pemasaran produk, dan pendistribusian program inovasi kepada masyarakat luas.

Penelitian Harmawan et al. (2022) yang berjudul "*Collective Leadership in Co-Production Process in Response to Covid-19 in Surabaya: The Case of Kampung Tangguh Jogo Suroboyo*" menunjukkan bahwa keberhasilan program *co-production* memerlukan keterlibatan berbagai aktor dan kepemimpinan kolektif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perikangas et al. (2024) dalam penelitian "*Co-Production of Social Innovations and Enabling Ecosystem for Social Enterprises*" menjelaskan bahwa *co-production* menjadi kunci dalam inovasi sosial yang dilakukan oleh social enterprise di Finlandia, di mana kolaborasi, aktivisme, dan jaringan berperan penting dalam menciptakan ekosistem inovatif.

Penelitian Londa et al. (2025) yang berjudul "*Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Sikka*" menyoroti bahwa dukungan dan komitmen pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam pengembangan inovasi daerah. Sementara itu, Riswanda et al. (2022) melalui penelitiannya "*Food*

Innovation and Local Social Movement: The Case of Juang Community of Lebak, Indonesia" menggambarkan bagaimana inovasi pangan berbasis komunitas dapat memperkuat ekonomi lokal dan memperluas akses pasar.

Mujahiddin et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Sinergitas Pemerintah dan Komunitas Desa Dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Deli Serdang*" menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan komunitas dalam pemberdayaan berbasis kearifan lokal agar mampu memperkuat kapasitas masyarakat. Sejalan dengan itu, Noack & Federwisch, (2019) melalui "*Social Innovation in Rural Regions: Urban Impulses and Cross-Border Constellations of Actors*" menjelaskan bahwa inovasi sosial di wilayah pedesaan lahir dari kolaborasi lintas aktor yang dimediasi oleh aktor perantara.

Galego et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Social Innovation & Governance: A Scoping Review*" menekankan bahwa inovasi sosial erat kaitannya dengan pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Sementara penelitian Vargas et al. (2022) dalam "*Co-Creation, Co-Design and Co-Production for Public Health*" menegaskan bahwa keberhasilan co-production bergantung pada hubungan timbal balik antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Klimczuk et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Editorial: Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors*" juga menyoroti bahwa partisipasi warga dapat memperkuat pembelajaran sosial dan keberlanjutan inovasi melalui pendekatan *design thinking* dan *action research*.

Selanjutnya, Adelle et al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Making sense together: The role of scientists in the co-production of knowledge for policy making*" menjelaskan bahwa co-production mampu meningkatkan legitimasi kebijakan, partisipasi warga, serta kepercayaan antara masyarakat dan lembaga publik. Ezeudu et al. (2021) melalui "*Exploring Co-Production as a Tool for Inclusive Waste Management in Nigeria*" menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bersama pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan pengelolaan limbah. Penelitian dari Steiner et al. (2023) yang berjudul "*Co-Production and Co-Creation in Public Services: A Systematic Review of Research and Practice*" menunjukkan bahwa co-production tidak hanya meningkatkan efisiensi dari pelayanan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi, inovasi, dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Smith et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Co-Production Practice and Future Research Priorities in United Kingdom-Funded Applied Health Research: A Scoping Review*" menunjukkan bahwa co-production berkembang pesat sebagai pendekatan kolaboratif antara akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk menciptakan intervensi yang lebih relevan dan berdampak terhadap sosial. Terakhir, penelitian Prastya et al., (2024) yang berjudul "*Co-Production Analysis in Waste Management: A Local Perspective*" menemukan bahwa praktik co-production dalam pengelolaan sampah muncul karena masalah lingkungan, keterbatasan layanan pemerintah, serta adanya dorongan masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga turut berperan sebagai produsen layanan publik.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut, konsep *co-production* menjadi sebuah pendekatan yang efektif dalam mendorong inovasi sosial melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya dalam penyediaan layanan publik. Keberhasilan dalam *co-production* tersebut tergantung dari partisipasi aktif warga, dukungan kelembangan, dan hubungan timbal balik yang dapat menciptakan nilai bersama. Penelitian ini berfokuskan kepada pengembangan program inovasi Republik Melon di Kecamatan Wates melalui proses *Co-Production* untuk mengetahui bagaimana bentuk keterlibatan petani melon dan bagaimana pengaruh perubahan yang dirasakan oleh petani melon dalam program Republik Melon apakah mampu menggambarkan proses *Co-Production* tersebut yang terdiri dari *collaboration*, *new ideas*, *empowerment*, dan *change (impact social)* dengan menggunakan teori dari *Social Innovation Pathways and Drawing The Link to Co-Production* yang dikemukakan oleh Ayob et al., (2016).

Dengan demikian, berdasarkan dengan latar belakang permasalahan dan didukung oleh penelitian terdahulu maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Co-Production* dalam Pengembangan Inovasi: Studi Kasus Republik Melon di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar”.

METODE PENELITIAN

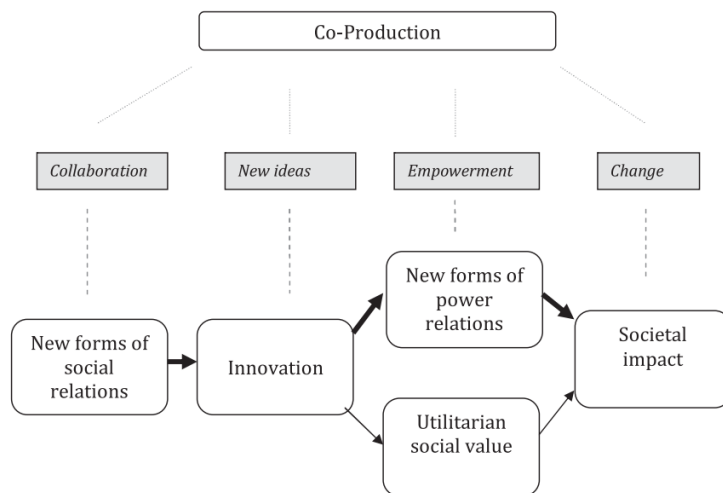
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial dan kemanusiaan. Penggunaan pendekatan studi kasus dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam keterlibatan petani melon dalam Program Republik Melon di Kecamatan Wates. Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan rendahnya partisipasi petani dalam program tersebut. Sumber data penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau populasi yang terpilih untuk dijadikan sampel. Jenis teknik *nonprobability sampling* yang digunakan merupakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Sehingga dapat diketahui bahwa yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu; 1) Inovator dari Program Republik Melon yang sekaligus menjadi pegawai dalam BPP Kecamatan Wates, 2) Pemerintah Kecamatan Wates, 3) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 4) Staff Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitnang Kabupaten Blitar, 5) Petani Melon, 6) Ketua KWT Wates, 7) Pengelola Hilirisasi Produk UMKM Desa Tugurejo. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data dari Miles et al. (2014) yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program inovasi daerah Republik Melon di Kecamatan Wates merupakan bentuk inovasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat petani melon. Program ini melibatkan berbagai aktor lokal, khususnya yaitu petani melon dalam proses produksi layanan publik secara kolaboratif. Pada bab ini yakni hasil dan pembahasan, hasil penelitian yang diperoleh dilapangan akan disajikan dan dianalisis berdasarkan dengan kerangka teori *Co-Production* yang dikemukakan oleh Ayob et al. (2016) yaitu *Social Innovation Pathways and Drawing The Link to Co-Production* yang mencakup empat elemen utama yang terdiri dari *collaboration* (kolaborasi), *new ideas* (gagasan baru), *empowerment* (pemberdayaan), dan *change* (perubahan).

Gambar 1. *Social Innovation Pathways and Drawing the Link to Co-Production*



Sumber : *Theoretical Framework* Ayob et al. (2016)

Teori tersebut menyebutkan bahwasanya inovasi sosial yang kuat memiliki kesamaan yang signifikan dengan *Co-Production*, yang pada gilirannya berkontribusi dalam memecah berbagai komponen dari proses inovasi sosial yang kuat (Ayob et al., 2016). Keempat elemen tersebut menjadi pisau analisis untuk memahami sejauh mana bentuk keterlibatan petani melon dalam program tersebut sehingga menghasilkan suatu dampak atau perubahan sosial maupun ekonomi.

A. Kolaborasi dalam Pengembangan Program Republik Melon Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar

Kolaborasi atau studi terkait dengan manajemen kolaborasi didefinisikan sebagai konsep yang mendeskripsikan proses dari fasilitasi dan beroperasi dalam pengaturan multi organisasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh satu organisasi (Poocharoen & Ting, 2015). Kolaborasi yang dimaksudkan tersebut merupakan sebuah kolaborasi yang menjadi sebuah bentuk baru dari hubungan sosial (Ayob et al., 2016). Bentuk

baru dari hubungan sosial tersebut terfokuskan kepada kolaborasi lokal dan saling membantu dalam komunitas dengan tujuan agar dapat memecahkan sebuah permasalahan untuk memunculkan sebuah pelaung baru (Ayob et al., 2016).

Berdasarkan dengan hasil yang didapatkan di lapangan maka dapat diperoleh hasil bahwasanya Program Republik Melon sebagai wujud dari inovasi daerah di Kecamatan Wates merupakan salah satu inovasi yang mengarah kepada inovasi sosial yang berkembang melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dengan tujuan agar dapat memecahkan permasalahan sosial yang terjadi di Kecamatan Wates khususnya bagi petani melon. Dalam pengembangannya, program ini tidak hanya dijalankan oleh satu aktor tunggal melainkan juga melibatkan beberapa aktor lainnya mulai dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, serta masyarakat petani sebagai pelaku utama, dan komunitas Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates sekaligus UMKM Desa Tugurejo. Berikut merupakan penjelasan terkait peran dan tanggung jawab dari masing-masing aktor yang terlibat:

Pertama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar memiliki peran dalam melakukan pembinaan budidaya melon bagi petani melon dalam program Republik Melon di Kecamatan Wates. Pembinaan yang dilakukan tersebut dapat berupa pemberian informasi budidaya melon dengan melalui pelatihan-pelatihan, sekolah lapang, pemberian sarana produksi kepada petani, dan pemasaran produk, serta pembiayaan produksi dengan cara menyediakan fasilitas kredit dari bank dengan bunga yang rendah bagi petani melon. Selain itu, DKKP Kabupaten Blitar juga memiliki peran dalam mengarahkan atau menghubungkan beberapa instansi pemerintahan dan instansi pendidikan untuk melakukan kunjungan atau melakukan penelitian ke Republik Melon. Seperti, adanya kunjungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan IPB yang diarahkan untuk melakukan penelitian pengembangan pada varietas melon dalam *greenhouse* di Republik Melon Kecamatan Wates.

Kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar yang memiliki peran dalam pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap program Republik Melon. Kegiatan tersebut dilakukan supaya Republik Melon mampu berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan mulai dari sektor pengelolaan dan sektor pemasaran. Selain itu, Bappedalitbang Kabupaten Blitar juga memiliki peran dalam penyedia regulasi. Republik Melon menjadi salah satu program inovasi daerah yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar. Bappedalitbang Kabupaten Blitar juga berperan dalam menghubungkan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan kegiatan-kegiatan perlombaan seperti lomba INOTEK.

Ketiga, Pemerintah Kecamatan Wates memiliki peran dalam mewadahi dan melakukan pendampingan akta notaris terhadap program Republik Melon. Pemerintah Kecamatan Wates memiliki tugas pokok dan fungsi yang lebih umum seperti memudahkan koordinasi antar berbagai pihak. Tidak hanya itu, Pemerintah Kecamatan Wates juga berperan dalam pembuatan dan pengelolaan website untuk Republik Melon. Keempat, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wates berperan

dalam melakukan pembinaan terhadap petani serta memberikan arahan dan saran kepada petani melon. Hal tersebut dikarenakan, Balai Penyuluhan Pertanian menjadi bentuk penyaluran tangan dari DKKP Kabupaten yang ada di setiap kecamatan. Kelima, petani melon sebagai pelaku utama memiliki peran yang utama dalam melakukan budidaya melon. Selain itu, petani melon juga tergabung di dalam Asosiasi Manajemen Petani Melon Milinial “Republik Melon” sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti bahwasanya petani melon menjadi aktor yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam keberlanjutan program. Keenam, Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates dan UMKM Desa Tugurejo. Kedua aktor ini berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal. Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates dan UMKM Desa Tugurejo memiliki peran dalam mengolah hasil tanam melon menjadi makanan yang memiliki nilai ekonomis. Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates mengolah hasil tanam melon menjadi keripik melon. Sementara itu, UMKM Desa Tugurejo mengolah hasil tanam melon sebagai Hilirisasi Produk yaitu menjadi minuman sari buah melon, dodol melon, dan wingko melon.

Berdasarkan dengan kajian penelitian lain yang berfokuskan kepada kolaborasi dalam pengembangan inovasi daerah, dapat dinyatakan bahwasanya faktor pendukung utama dalam pengembangan inovasi daerah yaitu adanya komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah yang menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan kebijakan dan strategi inovasi (Londa et al., 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya mengenai kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan Program Republik Melon di Kecamatan Wates. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

B. Gagasan Baru dalam Mendukung Pengembangan Program Republik Melon Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar

Sebuah inovasi mengarah kepada adanya restrukturisasi antara hubungan sosial dan kekuasaan. Bentuk baru dalam sebuah hubungan sosial tersebut mengarah kepada sebuah inovasi yang dapat menciptakan nilai sosial dengan dampak sosial tertentu (Ayob et al., 2016). Menurut Ayob et al. (2016) secara spesifik, inovasi sosial adalah sebagai gagasan baru (produk, layanan, dan model) yang secara bersamaan memenuhi kebutuhan sosial dan menciptakan hubungan sosial atau kolaborasi baru. Sehingga dalam kata lain, hal tersebut merupakan sebuah bentuk inovasi yang baik untuk masyarakat dan dapat meningkatkan kapasitas dari masyarakat untuk bertindak.

Berdasarkan dengan hasil lapangan maka dapat diketahui bahwasanya Program Republik Melon di Kecamatan Wates tidak hanya berfokuskan kepada pengembangan dan peningkatan hasil budidaya melon yang dapat berpengaruh ke dalam kesejahteraan sosial dan perekonomian petani melon. Namun, Republik Melon juga mengembangkan berbagai bentuk inovasi pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan sosial dari masyarakat yang sekaligus dapat mendorong keterlibatan individu atau kelompok yang sebelumnya kurang terlalu dilibatkan dalam kegiatan. Kelompok yang dilibatkan tersebut yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates dan UMKM Desa Tugurejo.

Salah satu inovasi pendukung dalam Program Republik Melon yaitu pengolahan buah melon menjadi keripik melon yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates. Kegiatan tersebut didasarkan oleh adanya hasil tanam buah melon yang tidak mampu memenuhi prospek pasar. Pengolahan buah melon menjadi keripik melon tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat memberdayakan ibu-ibu tani guna untuk memperoleh penghasilan tambahan dari usaha lainnya. Kegiatan pelatihan dalam pengolahan keripik melon oleh Kelompok Wanita Tani juga dilakukan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengolahan keripik melon. Sehingga dari pelatihan dan praktik langsung dalam pengolahan keripik melon tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang positif kepada anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates yakni agar mereka mampu memperoleh keterampilan baru dalam bentuk pengolahan makanan dan manajemen usaha kecil.

Gambar 2. Keripik Buah dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates



Sumber : Dokumentasi Internal KWT Wates

Namun, dikarenakan adanya keterbatasan dalam daya simpan dan pemasaran produk keripik melon, maka produksi melon tersebut pada saat terdapat permintaan pesanan atau dengan sistem *by order*. Sehingga untuk mendukung keberlanjutan dari aktivitas Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates maka dilakukanlah produksi keripik buah lainnya yaitu keripik pisang dan keripik nangka.

Gambar 3. Hilirisasi Produk oleh UMKM Desa Tugurejo



Sumber : Dokumentasi Internal UMKM Desa Tugurejo

Selain pengolahan keripik melon oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Melon, juga terdapat pengolahan buah melon menjadi program Hilirisasi Produk menjadi minuman sari buah melon, dodol melon, dan wingko melon oleh UMKM Desa Tugurejo. Pengembangan inovasi dukungan Hilirisasi Produk ini menunjukkan adanya penguatan dari sisi model bisnis lokal. Keterlibatan UMKM Desa Tugurejo merupakan salah satu bentuk dalam melibatkan kelompok untuk menciptakan produk yang tidak terserap oleh pasar untuk menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis.

Bentuk keterlibatan dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates dalam pengolahan keripik melon dan UMKM Desa Tugurejo dalam program Hilirisasi Produk pada Program Republik Melon maka menunjukkan adanya restrukturisasi hubungan sosial yang berbasis partisipasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam program tetapi juga turut aktif dalam program inovasi pendukung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian. Proses tersebut mencerminkan bentuk inovasi sosial yang lahir dari interaksi sosial dalam komunitas lokal sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberdayakan ibu-ibu tani dan memberikan tambahan penghasilan. Hasil kajian tersebut selaras dengan kajian Riswanda et al. (2022) yang menyoroti tentang *food innovation* oleh Komunitas Juang di Lebak dalam pengembangan madu lokal sebagai memperkuat ekonomi dan memperluas akses pasar.

C. Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Program Republik Melon Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar

Pemberdayaan digunakan sebagai elemen kunci dalam proses mendukung *Co-Production* yaitu sebagai strategi untuk menciptakan hubungan kekuasaan yang direstrukturisasi melalui keterlibatan individu dan kelompok yang sebelumnya kurang beruntung (Ayob et al., 2016). *Empowerment as Co-Production* pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan yang menekankan kepada konsep pemberdayaan yang berasal dari teori partisipasi masyarakat dan teori perencanaan yang

mementingkan keterlibatan pengguna dalam sebuah konsep pelayanan (Mujahiddin et al., 2023). *Empowerment as Co-Production* tersebut memfokuskan kepada kemampuan dalam mempengaruhi perubahan dan mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai komponen penting dari masyarakat (Mujahiddin et al., 2023).

Berdasarkan dengan hasil penelitian di lapangan maka dapat dinyatakan bahwasanya pemberdayaan yang dilakukan pada Program Republik Melon di Kecamatan Wates tersebut hadir melalui inisiatif dari pemerintah atau lembaga institusi maupun melalui inisiatif dari petani melon. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar melakukan pemberdayaan dalam program Republik Melon dalam bentuk pelatihan budidaya melon yang dapat memungkinkan masyarakat petani melon untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi bersama dengan pemateri. Sehingga petani tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi petani juga menjadi pelaku aktif dalam pengembangan pertanian. Selain itu, dalam pelatihan yang dilakukan tersebut juga menunjukkan adanya suatu kegiatan transfer ilmu diantara petani dengan pemateri. Hal tersebut dapat menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat petani melon pada pelatihan tersebut mengarah kepada adanya restrukturisasi hubungan kekuasaan yang memungkinkan petani melon dalam Program Republik Melon maupun petani melon di Kecamatan Wates untuk terlibat aktif dalam pengembangan program.

Gambar 4. Program Pemberdayaan Transfer Teknologi dari PENS



Sumber : Dokumentasi Instagram Republik Melon
<https://www.instagram.com/republikmelon/>

Keterlibatan lembaga pendidikan seperti IPB dalam melakukan pengembangan pada varietas melon dalam *greenhouse* di Republik Melon Kecamatan Wates dan PENS dalam melakukan kegiatan transfer teknologi berbasis dengan IoT dan dashboard kondisi *greenhouse* dengan judul “Replon-Dashboard” yang sama-sama memiliki tujuan dalam peningkatan kapasitas masyarakat petani untuk berbudidaya melon. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya pemberdayaan kepada petani yang berupa pengembangan budidaya melon melalui penelitian,

serta transfer teknologi berupa sensor yang dapat mendukung budidaya melon. Kegiatan tersebut maka dapat menunjukkan adanya suatu perluasan jejaring dan transfer pengetahuan yang dapat memperkuat posisi petani secara struktural dan teknologis sebagai petani melon milineal.

Selain itu, pemberdayaan petani melon tidak hanya dilakukan secara vertikal dari pemerintah maupun lembaga institusi. Namun, pemberdayaan petani melon juga dilakukan secara horizontal yaitu dari Pendamping Lapangan (PL) yang juga merupakan seorang petani melon dan bertugas untuk melakukan pendampingan dalam proses budidaya melon mulai dari penanaman sampai dengan panen. Sehingga dari keterlibatan Pendamping Lapangan (PL) dalam proses pemberdayaan tersebut maka menunjukkan adanya suatu perubahan dalam distribusi pengetahuan dan kepemimpinan di kalangan petani melon.

Pemberdayaan juga dilakukan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates untuk melakukan sekolah langsung kepada orang yang profesional dalam bidang pengolahan buah dengan menggunakan teknologi modern. Kemudian, kegiatan pemberdayaan dan pelatihan juga dilakukan oleh UMKM Desa Tugurejo melalui kegiatan program Hilirisasi Produk dengan mengolah hasil melon yang tidak memiliki nilai jual dipasaran agar dapat memberikan nilai ekonomis dengan mengubah buah melon menjadi minuman sari buah melon, dodol melon, dan wingko melon.

Pemberdayaan petani melon dalam Program Republik Melon dapat diwujudkan melalui pelatihan budidaya melon, transfer teknologi oleh lembaga pendidikan, serta pendampingan oleh Pendamping Lapangan (PL). Pemberdayaan dan pelatihan juga dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates dan UMKM Desa Tugurejo. Berdasarkan beberapa upaya dalam pemberdayaan masyarakat petani melon dalam meningkatkan kapasitas petani melon untuk berbudidaya melon tersebut dapat menggambarkan bahwa petani tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses perkembangan inovasi.

Dengan demikian maka pemberdayaan yang dilakukan dalam Program Republik Melon tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas petani melon dalam berbudidaya melon, tetapi juga mampu menunjukkan adanya suatu restrukturisasi hubungan sosial yang berupa keterlibatan aktif petani melon dalam proses pemberdayaan. Kajian penelitian ini sejalan dengan hasil kajian dari Mughiddin et al. (2023) yang menegaskan bahwa adanya sinergi antara pemerintah dan komunitas dalam pemberdayaan berbasis kearifan lokal, yang turut memperkuat kapasitas komunitas untuk berpartisipasi secara aktif.

Sehingga temuan ini sejalan dengan pendapat Ayob et al. (2016) yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebagai bentuk dari *Co-Production* yang menekankan kepada keterlibatan kelompok marjinal dalam mempengaruhi perubahan sosial melalui partisipasi masyarakat.

D. Perubahan Dampak Sosial Bagi Masyarakat dan Petani Melon dalam Program Republik Melon Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar

Perubahan sosial menjadi bagian akhir dalam sebuah inovasi sosial. Inovasi sosial yang lemah hanya menekankan kepada peningkatan kesejahteraan individu tanpa mengubah struktur kekuasaan yang ada. Sementara itu, inovasi sosial yang kuat mampu menciptakan sebuah perubahan yang mengarah kepada perubahan struktural dan redistribusi kekuasaan dalam masyarakat (Ayob et al., 2016). Perubahan dalam *Co-Production* tersebut mengarah kepada perubahan sosial yang memiliki dampak sosial Ayob et al. (2016). Sehingga hal ini dapat membawa perubahan dalam sebuah hubungan kekuasaan agar dapat mencapai dampak sosial yang cukup menantang. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan yang relevan dan penciptaan ekosistem sangat diperlukan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat dinyatakan bahwasanya Program Republik Melon di Kecamatan Wates mempunyai tujuan utama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dari masyarakat petani melon. Republik Melon telah mampu mendorong munculnya berbagai bentuk perubahan baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam aspek ekonomi, beberapa petani mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan dari hasil budidaya melon yang mengalami keuntungan. Sementara itu, juga terdapat beberapa petani yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh permasalahan dalam penanaman. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi dalam perubahan perekonomian, tetapi dampak perubahan yang terjadi masih bersifat individual dan tidak merata karena tergantung dengan ketekunan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses budidaya melon.

Dampak perubahan sosial yang terjadi pada Program Republik Melon dapat mengarah kepada kategori inovasi yang lemah dan akan menuju kepada perubahan inovasi sosial yang kuat. Hal tersebut dikarenakan dampak perubahan yang ditimbulkan lebih mengarah kepada kesejahteraan sosial masyarakat yang ada. Masyarakat petani melon mengalami keuntungan dalam finansial pada saat melakukan budidaya melon pada Program Republik Melon merupakan sebuah wujud dari adanya peningkatan utilitas individu. Meskipun demikian, tidak keseluruhan masyarakat petani melon mengalami keuntungan dalam finansial meskipun sama-sama berkecimpung di dalam budidaya melon di Republik Melon.

Perubahan dalam kesejahteraan sosial juga diwujudkan dengan adanya terbukanya lapangan pekerjaan baru seperti pembuatan *greenhouse* yang dapat digunakan untuk berbudidaya melon dan tanaman lainnya. Omset pembuatan *greenhouse* bisa mencapai kurang lebih Rp40.000.000,00 dengan ukuran 10 m x 50 m.

Gambar 5. Pembuatan *Greenhouse* Sebagai Bentuk Terbukanya Lapangan Pekerjaan Baru Bagi Petani Melon



Sumber : Dokumentasi Internal Petani Melon

Selain itu, munculnya penyerapan tenaga kerja tani khususnya pada budidaya melon menjadi salah satu bentuk dari terciptanya lapangan pekerjaan. Selain itu, adanya perluasan target pasar dan adanya kemudahan petani dalam melakukan distribusi hasil budidaya melon maka dapat menunjukkan adanya suatu dampak sosial yang timbul dari sebuah perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, dengan adanya Republik Melon juga dapat menunjukkan adanya perubahan yang mengarah kepada inovasi sosial yang kuat. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya suatu hubungan sosial baru dengan berbasiskan kolaborasi dan pemberdayaan dari komunitas Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates. UMKM Desa Tugurejo. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, namun juga mendorong munculnya aktor-aktor baru dalam pengambilan peran dan keputusan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan suatu dampak sosial yang bersifat fungsional, tetapi juga mendorong adanya perubahan dalam struktur sosial dan pembagian peran di tingkat masyarakat lokal.

Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari adanya Program Republik Melon pada saat ini berada dalam fase transisi dari inovasi sosial yang lemah menuju inovasi sosial yang kuat. Secara konseptual, inovasi sosial lemah tercermin melalui peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat seperti keuntungan secara finansial yang diperoleh oleh petani pasca panen, terciptanya lapangan pekerjaan baru, dan akses pasar yang lebih luas. Namun, hal tersebut masih terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, indikasi perubahan pada inovasi sosial yang kuat mulai terlihat pada proses *Co-Production* yang melibatkan aktor dari masyarakat maupun ibu-ibu tani seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates dan UMKM Desa Tugurejo yang berperan dalam melakukan pengolahan hasil melon agar dapat memperoleh nilai ekonomis. Pergeseran peran tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif

lokal, namun juga mengubah pada struktur hubungan sosial menuju redistribusi peran dan pengaruh dalam sistem budidaya tanaman melon.

KESIMPULAN

Program Republik Melon menjadi salah satu bentuk inovasi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan sosial dari petani melon dengan cara berbudidaya tanaman melon dengan melalui pendekatan *Co-Production*. Republik Melon menunjukkan adanya keterlibatan multi-aktor dalam lintas sektor. Petani melon berpartisipasi dalam setiap rangkaian pada proses *Co-Production*. Partisipasi masyarakat petani melon mulai dari kolaborasi antar aktor yang mana petani melon menjadi pelaku utama dalam program Republik Melon, kelompok ibu tani dan masyarakat desa berpartisipasi dalam program inovasi pendukung seperti adanya keterlibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) Wates dalam pengolahan keripik melon dan UMKM Desa Tugurejo berpartisipasi dalam program Hilirisasi Produk, petani melon juga terlibat dalam kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan/lembaga pendidikan/Pendamping Lapangan, serta petani melon mulai merasakan dampak sosial dari adanya program seperti mulai adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial serta mulai adanya redistribusi peran dari masyarakat.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pelaksana program sebagai bahan evaluasi serta dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dari program Republik Melon di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Selain itu, melalui pendekatan *co-production* diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperkuat kolaborasi, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan program inovasi daerah lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Program Republik Melon telah bersedia untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Terhususnya kepada pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Kecamatan Wates, BPP Kecamatan Wates, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, Petani Melon Kecamatan Wates, Kelompok Wanita Tani Wates, dan UMKM Desa Tugurejo atas dukungan dan informasi yang diberikan selama proses penelitian.

REFERENCES

- Adelle, C., Pereira, L., Görgens, T., & Losch, B. (2020). Making sense together: The role of scientists in the coproduction of knowledge for policy making. *Science and Public Policy*, 47(1), 56–66. <https://doi.org/10.1093/scipol/scz046>

- Asmoro, B. T., & Imron, M. (2019). Coproduction Sebagai Solusi Atas Pembaruan Layanan Oleh Warga (Citizen Welfare) Kampung Wisata 3G (Glantung Go Green). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 44–57. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Ayob, N., Teasdale, S., & Fagan, K. (2016). How social innovation “Came to Be”: Tracing the evolution of a contested concept. *Journal of Social Policy*, 45(4), 635–653. <https://doi.org/10.1017/S004727941600009X>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2024). *Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Blitar, 2023*. <https://blitarkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YlhOVmIxcG1abmRxVURoS1dFbFVTamhaUml0aWR6MDkjMw==/luas-panen-tanaman-sayuran-menurut-kecamatan-dan-jenis-tanaman-di-kabupaten-blitar--2023.html?year=2023>
- Brandsen, T., & Pestoff, V. (2006). Co-production, the third sector and the delivery of public services. An introduction. *Public Management Review*, 8(4), 493–501. <https://doi.org/10.1080/14719030601022874>
- Cepiku, D., Masilio, M., Sicilia, M., & Vainieri, M. (2020). *The Co-production of Public Services Management and Evaluation*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-60710-4>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edition). SAGE Publications, Inc.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2023, December 13). Pemprov Jatim Raih Penghargaan “Provinsi Terinovatif” di IGA 2023 Kemendagri. <https://kominfo.jatimprov.go.id/>. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemprov-jatim-raih-penghargaan-provinsi-terinovatif-di-iga-2023-kemendagri>
- Eriksson, E. (2022). Coproduction and inclusion: A public administrator perspective. *International Public Management Journal*, 25(2), 217–240. <https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1969486>
- Ezeudu, O. B., Oraelosi, T. C., Agunwamba, J. C., & Ugochukwu, U. C. (2021). Co-production in solid waste management: analyses of emerging cases and implications for circular economy in Nigeria. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(37), 52392–52404. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-14471-8>
- Galego, D., Moulaert, F., Brans, M., & Santinha, G. (2022). Social innovation & governance: a scoping review. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 35(2), 265–290. <https://doi.org/10.1080/13511610.2021.1879630>

- Harmawan, B. N., Lucca, A. P., Arundinasari, I., Abdullah, W. S., & Hasana, D. P. (2022). Collective Leadership in Co-Production Process in Response to Covid-19 in Surabaya: The Case of Kampung Tangguh Jogo Suroboyo. *Jurnal Ad'ministrare*, 9(2), 457. <https://doi.org/10.26858/ja.v9i2.37759>
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah* (E. R. Fadilah, Ed.). Deepublish.
- Irkham, S. S., Kamil, M., & H, S. (2019). Application of Co-Production in Waste Management Through Waste Banks Program in Batu City. *Journal of Local Government Issues*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.22219/logos.vol2.no2.149-167>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. (2024). *Detail Capaian Inovasi Pada Masing-Masing Daerah Tahun 2023*.
- Klimczuk, A., Butkeviciene, E., & Kerla, M. (2022). Editorial: Citizen Science and Social Innovation: Mutual Relations, Barriers, Needs, and Development Factors. In *Frontiers in Sociology* (Vol. 7). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.836149>
- Londa, M. V., Rengga, A., & Yulianti, M. (2025). ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENERAPAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN SIKKA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 2401–2411.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Moridu, I., Doloan, A., Hartaty Posumah, N., Hadiyati, R., Kune, D., & Yadasang, R. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial dalam Menangani Masalah Sosial. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(01), 42–53. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i01>
- Mujahiddin, Tanjung, Y., & Saputra, S. (2023). Sinergitas Pemerintah dan Komunitas Desa Dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Deli Serdang. *Sospol*, 9(2), 261–272. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v9i2.28286>
- Naami, M. A., & Maemunah, M. (2024). Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 212–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4260>
- Noack, A., & Federwisch, T. (2019). Social Innovation in Rural Regions: Urban Impulses and Cross-Border Constellations of Actors. *Sociologia Ruralis*, 59(1), 92–112. <https://doi.org/10.1111/soru.12216>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

- Perikangas, S., Kostilainen, H., & Kainulainen, S. (2024). Co-production of social innovations and enabling ecosystems for social enterprises. *International Journal of Public Sector Management*, 37(3), 351–369. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-04-2023-0111>
- Poocharoen, O. orn, & Ting, B. (2015). Collaboration, Co-Production, Networks: Convergence of theories. *Public Management Review*, 17(4), 587–614. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.866479>
- Prastya, I. Y., Putranti, I. R., Yuniningsih, T., Priyadi, B. P., & Mangai, M. (2024). Co-Production Analysis in Waste Management: A Local Perspective. *Journal of Local Government Issues*, 7(2), 176–193. <https://doi.org/10.22219/logos.v7i2.32612>
- Ramadhan, T. M. R., & Juwono, V. (2021). Citizen's Participation as Co-Producer in Licensing. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(2), 337. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.2.337-354.2021>
- Republik Melon. (2024). Penghargaan Yang Diperoleh Republik Melon. <https://Republikmelon.Com>.
<https://republikmelon.com/berita/profil/penghargaan>
- Riswanda, Hikmawan, M. D., Nurrohman, B., Indriyany, I. A., & Mayrudin, Y. M. (2022). Food Innovation and Local Social Movement: The Case of Juang Community of Lebak, Indonesia. *Journal of Asian Social Science Research*, 2022(2), 149–164. <https://cassr.net/jassr/>
- Smith, H., Budworth, L., Grindey, C., Hague, I., Hamer, N., Kislov, R., van der Graaf, P., & Langley, J. (2022). Co-production practice and future research priorities in United Kingdom-funded applied health research: a scoping review. In *Health Research Policy and Systems* (Vol. 20, Issue 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00838-x>
- Steiner, A., Farmer, J., Yates, S., Moran, M., & Carlisle, K. (2023). How to systematically analyze co-production to inform future policies? Introducing 5Ws of co-production. *Public Administration Review*, 83(3), 503–521. <https://doi.org/10.1111/puar.13571>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA,CV.
- Sunarjo, W. A. (2024). *Buku Ajar Manajemen Inovasi* (1st ed.). PT Nasya Expanding Manajement.
https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Manajemen_Inovasi/Zx39EAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Turnhout, E., Metze, T., Wyborn, C., Klenk, N., & Louder, E. (2020). The politics of co-production: participation, power, and transformation. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 42, 15–21. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.11.009>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Vargas, C., Whelan, J., Brimblecombe, J., & Allender, S. (2022). Co-creation, co-design and co-production for public health: a perspective on definitions and distinctions. *Public Health Research and Practice*, 32(2). <https://doi.org/10.17061/PHRP3222211>

Widhagdha, F. M., & Anantanyu, S. (2022). Community Empowerment Based on Social Innovation "Kampung Pangan Inovatif" In Plaju Ulu, Palembang, South Sumatra. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 63–70.

Zai, P. P., & Wardiyanto, B. (2024). Analisis Inovasi Warak Ngendog Dalam Perspektif New Public Governance. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 381–392. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8038>